

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Penanganan Hisab dan Rukyat Pada Pengadilan Agama dan Kementerian Agama RI

1. Peradilan Agama

Penanganan dan pelaksanaan hisab dan rukyat secara umum semula dilakukan oleh Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI (baca Kementerian Agama RI) di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Ditjen Bimas Islam dan PH) yang bertanggungjawab kepada Menteri Agama RI. Pelaksanaan dan tugas teknis operasionalnya ditangani oleh Subdit Pertimbangan Hukum Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam. Sedang wadah komunikasi dan pemersatu aspirasi umat Islam di bidang hisab rukyat dan hari raya ditangani oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI (BHR). Ketua BHR Departemen Agama RI dijabat secara *ex officio* oleh Direktur Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam.

Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 76 Tahun 1972 tentang Pembentukan BHR Kementerian Agama.²² Surat Keputusan Nomor 76 tahun 1972 di atas

²² Isi SK Menteri Agama RI sebagai berikut: *pertama*, membentuk BHR Departemen Agama. *Kedua*, tugas BHR tersebut adalah memberikan saran-saran kepada Menteri Agama dalam penentuan permulaan tanggal Bulan-Bulan Kamariah. *Ketiga*, kepengurusan BHR tersebut terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan anggota tersebar. *Kempat*, anggota tetap tersebut merupakan pengurus harian yang menangani masalah sehari-hari,

ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 1972 tentang Personalia BHR Departemen Agama.²³

Dalam pelantikan pengurus dan anggota BHR, H.A.Mukti Ali (Menteri Agama RI) menyampaikan pidato dan pandangannya bahwa tiga hal penting yang berkaitan dengan terbentuknya BHR tersebut. *Pertama*, menentukan hari-hari besar Islam dan hari libur nasional yang berlaku seluruh Indonesia. *Kedua*, menyatukan penentuan awal bulan Islam yang berkaitan dengan ibadah umat Islam, seperti 1 Ramadan, 1 Syawal (Idul Fitri), 10 Zulhijah (Idul Adha). *Ketiga*, menjaga persatuan umat Islam dan mengupayakan pertentangan dan perbedaan dalam pandangan ahli hisab dan rukyat dan meminimalisir adanya perbedaan dalam partisipasi untuk membangun bangsa dan negara.²⁴

Selain itu, ada hal yang menarik dari pidato yang disampaikan oleh Menteri Agama RI dalam pelantikan BHR tersebut, beliau menyatakan bahwa : Matahari telah tinggi berada di ufuk, umat Islam lama terpanggil

sedangkan anggota tersebar bersidang dalam waktu-waktu tertentu menurut keperluan. *Kelima*, anggota tersebut diangkat dengan keputusan tersendiri oleh Ditjen Bimas Islam dan PH. *Kkeenam*, BHR tersebut dalam melakukan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktorat Badan Peradilan Agama Islam. *Ketujuh*, kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku. *Kedelapan*, segala pengeluaran dan biaya-biaya dari BHR tersebut dibebankan kepada anggaran belanja Kementerian Agama yang selaras untuk keperluan dimaksud. *Kesembilan*, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Baca Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama. 1981. *Almanak Hisab & Rukyat*. Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Hal, 24-25.

²³ H.A.Mukti Ali (Menteri Agama RI) melantik personalia/susunan pengurus dan anggota BHR, pada tanggal 23 September 1972. Dikemukakan isi SK Susunan BHR sebagai berikut : Sa'aduddin Djambek (Jakarta, sebagai Ketua), A.wasit Aulawi, MA (Jakarta, sebagai Wakil Ketua), Drs. Djabir Manshur (Jakarta, sebagai Sekretaris), H.Zaini Ahmad Noeh (Jakarta, sebagai anggota), Drs. Susanto (Jakarta, sebagai anggota), Drs. Santoso (Jakarta, sebagai anggota), Rodi Saleh (Jakarta, sebagai anggota), K.H. Djunaidi (Jakarta, sebagai anggota), Kapten Laut Muhadji (Jakarta, sebagai anggota), Drs. Penuh Dali (Jakarta, sebagai anggota), dan Sjarifuddin, BA. (Jakarta, sebagai anggota). Hal, 25-26.

²⁴ *Ibid*.

sudah untuk menunaikan tugasnya membina umat, bangsa dan negara. Tetapi kalau soal seperti menentukan permulaan dan akhir bulan puasa saja, umat Islam belum dapat menemukan jalan dan cara untuk menyatukannya, dirasakan sulit masih bagi umat Islam di Indonesia ini untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan-pekerjaan besar hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar.²⁵ Baik hisab maupun rukyat sasarannya adalah satu, ialah “hilal”, atau bulan tanggal satu Kamariah. Kalau memang sasarannya satu, tetapi terdapat perbedaan, maka hal itu disebabkan karena: *Pertama*, mungkin hisabnya yang salah, atau. *Kedua*, mungkin rukyatnya yang kurang tepat. *Ketiga*, mungkin kedua-duanya, hisab dan rukyat yang tidak betul. Jika hisabnya betul dan rukyatnya tepat, maka pasti akan menemukan sasarannya yang satu itu, ialah “hilal” tanggal satu awal bulan Kamariah.²⁶

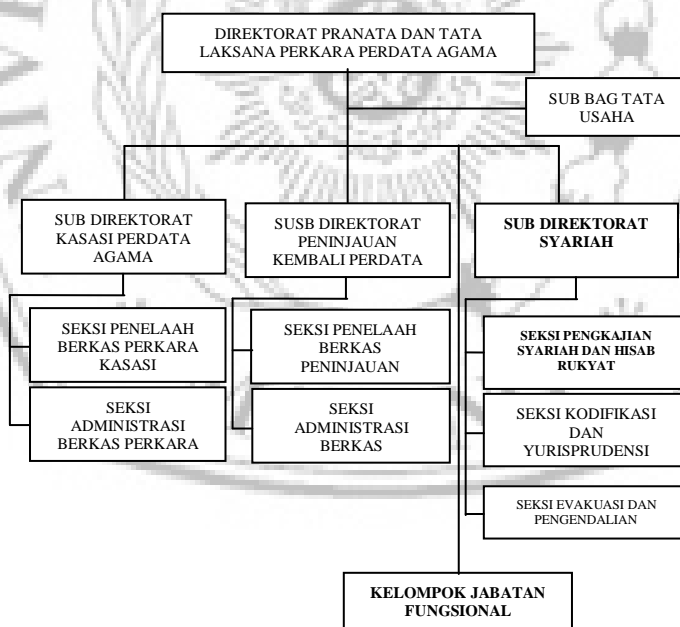
Dengan demikian, termasuk pelaksanaan di bidang hisab dan rukyat serta pembinaanya yang sebelum ditangani oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama beralih dan menjadi tanggungjawab Direktorat Urusan Agama Islam Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI pada Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat. Sesuai dengan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi “*Pengadilan Agama*

²⁵ Departemen Agama RI. 1983/1984. *Pedoman Teknik Rukyat*. Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Dijten Binbaga Islam Kementerian Agama. Hal, 101.

²⁶ *Ibid*. Hal, 102.

memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal Bulan pada tahun Hijriah”. Sejak Undang-undang itu berlaku, Direktorat Badan Peradilan Agama hanya menangani regulasi perkara/permohonan isbat kesaksian rukyatul hilal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun Hijriah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pelaksanaan rukyatul hilal di daerah dikoordinir oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Pengadilan Agama, pemerintah daerah, ormas Islam, Perguruan Tinggi, pondok pesantren, para ahli hisab rukyat dan tokoh masyarakat.

Bagan 1
Struktur Organisasi Ditjen Badilag MARI



Sumber data : Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

2. Kementerian Agama RI

Sebelum momentum satu atap sistem Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tersebut pada alenia 4 menyatakan bahwa: Dengan berlakunya undang-undang ini, pembinaan badan Peradilan umum, badan Peradilan Agama, badan Peradilan Militer dan badan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan Peradilan Agama yang spesifik dalam sistem Peradilan nasional, pembinaan terhadap badan Peradilan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.²⁷

Pada alenia 5 : Perubahan Undang-undang tersebut telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁸

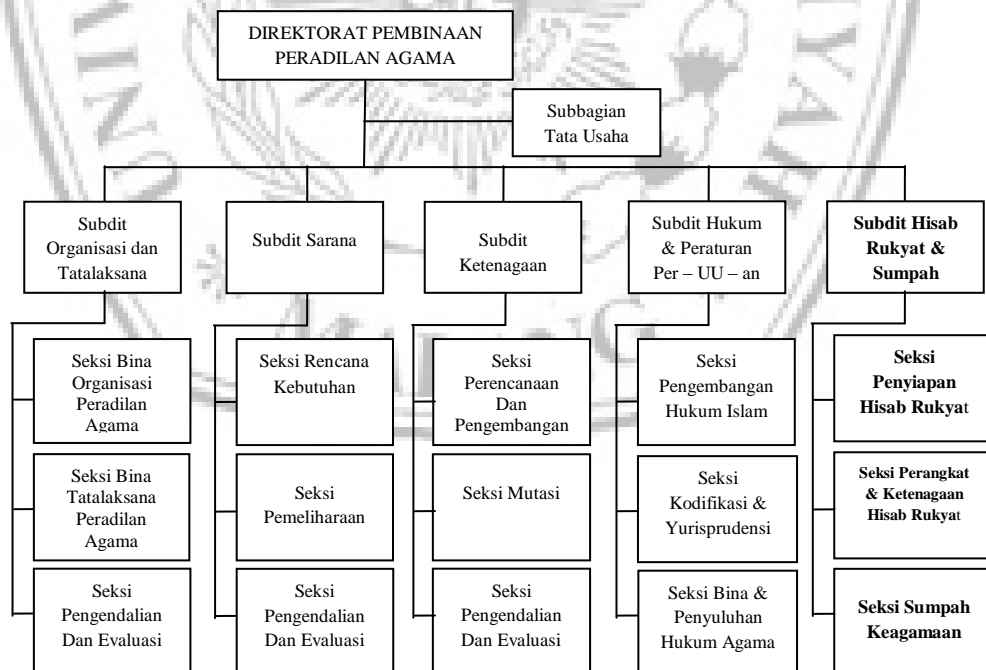
²⁷ Selengkapnya baca penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. 2004. Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Hal, 482-483.

Keterlibatan Pengadilan Agama/hakim dalam penanganan masalah hisab dan rukyat ini merupakan dari hukum Islam. Dimana pemerintahlah yang berwenang menerapkan persoalan awal bulan Kamariah, terutama dalam menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.

Penanganan hisab dan rukyat sebelum Peradilan Agama satu atap dengan Mahkamah Agung RI menjadi tanggungjawab di bawah Sub Direktorat Hisab dan Rukyat (eselon III) Ditjen Badilag dengan dibantu 2 Kepala Seksi (Kasi) yaitu Kasi Penyiatan Hisab Rukyat, dan Kasi Perangkat dan Ketenagaan Hisab Rukyat dan tugas pembinaan dan pelayanan masyarakat di bidang hisab dan rukyat.

Bagan 2
Struktur Organisasi Ditbinpera Ditjen Bimas Islam dan PHDA RI



Sumber data : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI

Bagan struktur di atas adalah struktur organisasi Direktorat Pembinaan Peradilan Agama di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, penanganan pembinaan teknis, kegiatan dan pelayanan hisab rukyat dikoordinasikan oleh Sub Direktorat Hisab Rukyat dan Sumpah (eselon III) yang terdiri dari Seksi Penyiapan Hisab Rukyat, Seksi Perangkat & Ketenagaan Hisab Rukyat dan Seksi Sumpah Keagamaan. Setelah Peradilan satu atap dengan Mahkamah Agung RI penanganan hisab rukyat bersifat teknis dan tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat.

B. Asal Usul Penggunaan Metode Hisab dan Rukyat

1. Metode Hisab

Kata *ḥisāb* adalah berasal dari bahasa Arab isim masdar, yaitu *ḥasiba-yahsibu-ḥisāban wa ḥisābatan*, berarti menghitung. Secara bahasa bermakna menghitung (‘*adda*), kalkulasi (*aḥṣa*), dan mengukur (*qadara*).²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hisab adalah hitungan; perhitungan; dan perkiraan.³⁰

Ilmu hisab disebut juga Astronomi, berasal dari bahasa Yunani (*astro* = bintang; *nomos* = ilmu) yakni ilmu perbintangan. Hisab juga

²⁹ Majma’ Lughah al-‘Arabiyyah Republik Arab Mesir. t.t. *Al-Mu’jam al-Wajiz*. Kairo. Hal, 149.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka. Hal, 405.

biasa disebut dengan Falak artinya tempat jalannya bintang (garis edar benda-benda langit).³¹

Hisab, falak, astronomi, dan peredaran bumi-bulan-matahari dijelaskan dalam al-Qur'an. Allah swt telah berfirman dalam surat Yūnus ayat 5 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan Dia-lah yang Menetapkan manzilah-manzilah (tempat-tempat) orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian dengan benar. Dia Menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*³²

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya: *Dan Kami Jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami Jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari kurnia dari Tuhan-mu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami Terangkan dengan jelas.*³³

³¹ Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Gresik. 2015. *Ilmu Hisab, Ilmu Nujum, Hukum Mempelajari Ilmu Hisab, Sejarah Ilmu Hisab, Tokoh-Tokoh Hisab Indonesia, Klasifikasi Hisab*. https://www.facebook.com/permalink.php?id=129923465409&story_fbid=10151586410870410, diakses pada tanggal 4 September 2017, pukul 20.15.

³² Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2010. Departemen Agama RI. Bandung : Penerbit CV Diponegoro. Surat Yūnus (10) : 5

³³ *Ibid*. Surat al-Isrā' (17) : 12

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan.³⁴

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya: Dan Dia-lah yang telah Menciptakan malam dan siang, matahari dan Bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya.³⁵

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.³⁶

Atas dasar itu, beberapa ulama kontemporer menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab,

الْأَصْلُ فِي إثْبَاتِ الشَّهْرِ أَنْ يَكُونَ بِالْحِسَابِ

Artinya: Pada dasarnya penetapan Bulan Kamariah itu adalah dengan hisab.³⁷

Pada mula perkembangan metode hisab di zaman Nabi saw dan pengetahuan masyarakat Arab mengenai benda-benda langit pada saat ini lebih banyak bersifat pengetahuan perbintangan praktis untuk kepentingan petunjuk jalan di tengah padang pasir di malam hari. Mereka

³⁴ Ibid. Surat ar-Rahmān (55) : 5

³⁵ Ibid. Surat al-Anbiyā' (21) : 33

³⁶ Ibid. Surat Yā Sīn (36) : 40

³⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2009. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hal, 14.

pada saat itu belum mempunyai pengetahuan canggih untuk melakukan perhitungan astronomis sebagaimana telah dikembangkan oleh bangsa-bangsa Babilonia, India, dan Yunani. Oleh karena itu, penentuan waktu-waktu ibadah, khususnya Ramadan dan Idul fitri, pada masa Nabi saw didasarkan kepada rukyat fisik, karena inilah metode yang tersedia dan mungkin dilakukan di zaman tersebut.³⁸ Nabi saw sendiri mengatakan,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً
تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi yang tidak dapat menulis dan menghitung. Jumlah Bulan ini seperti ini dan seperti ini dan seperti ini, maksudnya, satu Bulan terkadang jumlahnya dua puluh sembilan hari dan kadang kali tiga puluh hari).*³⁹

Hadis diatas tersebut menunjukkan bahwa perintah Nabi saw agar melakukan rukyat itu adalah perintah yang disertai illat, yaitu keadaan ummat masih ummi. Keadaan ummi artinya belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga apabila keadaan itu telah berlalu, maka perintah tersebut tidak berlaku lagi, yaitu hisab boleh digunakan dan lebih utama untuk dipakai.⁴⁰ Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung. Bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan

³⁸ *Ibid.* Hal, 5.

³⁹ Al-Bukhārī. 1994/1414. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. II. Ttp.: Dār Al-Fikr. Hal, 281, hadis no. 1913, "Kitāb aṣ-Ṣaum" dari Ibn 'Umar; Muslim. 1992/1412. *Ṣaḥīḥ Muslim*. I. Beirut: Dār al-Fikr. Hal, 482, hadis no. 1080:15, "Kitāb aṣ-Ṣiyam" dari Ibn 'Umar.

⁴⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Loc.cit.* Hal, 15.

keesokan harinya dan hilal tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.⁴¹ Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi,

الْحُكْمُ يَذُورَمَعِ عَلَيْهِ وَسَبَبِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: *Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illat dan sebabnya.*⁴²

Maka ketika 'illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah hapus, karena tulis baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, kembali kepada semangat umum dari al-Quran, yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan baru Kamariah.⁴³

Jadi pengertian ilmu hisab yang dimaksud dalam studi ini adalah salah satu ilmu yang mempelajari perhitungan gerak benda-benda langit berdasarkan garis edarnya. Benda-benda langit yang dimaksud adalah matahari, bulan, planet dan lain-lainnya. Ilmu hisab yang akan kita bahas adalah perhitungan pergerakan posisi hilal pada akhir bulan Kamariah untuk menentukan awal bulan tanggal satu dalam kalender Hijriah, seperti menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.

⁴¹ Ibid. Hal, 75-76.

⁴² Ibn al-Qayyim. 1973. *I'lām al-Muwaqqi'in. 'an Rabb al-'Ālamīn*. IV. Beirut: Dār al-Jil. Hal, 105.

⁴³ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Loc.cit*. Hal, 76.

2. Metode Rukyat

Kata *ru'yah* adalah berasal dari bahasa Arab isim masdar dari *ra'a-yara-ra'yan wa ru'yatan*, bentuk pluralnya *ru'yan* dan *ra'yan*. Artinya menurut bahasa adalah melihat (*al-nazar*) dengan kata lain mempunyai makna melihat dengan mata langsung atau kasat mata (*bil'ain*), bisa pula bermakna melihat dengan ilmu (*bil'ilm*).⁴⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukyat adalah : 1) perihal melihat bulan tanggal satu untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa Ramadan; 2) penglihatan, pengamatan.⁴⁵

Kata rukyat selalu dihubungkan dengan kata *al-hilāl*, sehingga menjadi rukyatul hilal. Disebut hilal, adalah karena kemunculannya pada malam pertama awal bulan Kamariah. Rukyatul hilal yang dimaksud dalam studi ini adalah melihat hilal di akhir bulan Syakban untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, dan akhir bulan Ramadan untuk menentukan tanggal 1 Syawal. Sedangkan hukum rukyatul hilal adalah *fardū kifayah*.

Rukyatul hilal adalah aktivitas kegiatan melihat hilal secara langsung (kasat mata) dan boleh menggunakan alat bantu, misalnya teropong, teleskop, theodolit dan binocular, pada akhir bulan menjelang

⁴⁴ Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn 'Abd al-Qadīr al-Rāzī. 1424 H/2003 M. *Mukhtar al-Ṣaḥḥah*. Kairo : Dār al-Ḥadīth. Hal. 133; lihat juga Departemen Agama RI. 1983/1084. *Pedoman Teknik Rukyat*. Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Dijten Binbaga Islam Kementerian Agama. Hal, 101.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Op.cit*. Hal, 966.

awal bulan Kamariah untuk menentukan tanggal satu Ramadan dan Syawal.

Dalam hadis Rasulullah saw. kata “rukyat” yang dihubungkan “hilal” sebagai berikut:

Pertama, kesaksian rukyatul hilal Ramadan yang didasarkan hadis Rasulullah saw dari Ibnu Umar:

تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي
رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

Artinya: *Orang-orang melihat hilal, kemudian saya sampaikan Rasulullah saw, “Sesungguhnya saya melihatnya (hilal), kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa”.*⁴⁶

Kedua, kesaksian rukyatul hilal Ramadan yang didasarkan hadis Rasulullah saw dari Ibnu Abbas:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ
قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ
قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا.

Artinya: *Telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad saw kemudian berkata, “Sungguh saya telah melihat hilal. Rasulullah bertanya, “Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah?” Orang tersebut menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah bersabda, “Wahai Bilal, umumkan kepada manusia (khalayak) agar mereka berpuasa besok”.*⁴⁷

⁴⁶ Abu Dawud dalam Sunan-nya, hadis no. 1995; Al-Darimi dalam Sunan-nya, hadis no. 1744; dan al-Daruqutni dalam Sunan-nya, hadis no. 2170.

⁴⁷ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismâ'il al-Bukhâri. t.t. *Shahîh al-Bukhâri*. t.th. : Maktabah Dahlân. Hal, 723.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya: Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. mengingatkan pada Bulan Ramadan, beliau bersabda: "Janganlah kalian semua berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihat hilal. Jika hilal tertutup awan, maka hitunglah Bulan itu."⁴⁸

C. Macam-Macam Metode Hisab

Metode hisab yang dimaksud dalam studi ini adalah metode atau cara hitung-menghitung gerak dan posisi perjalanan benda langit matahari, bumi dan bulan. Kategori macam-macam metode hisab ini didasarkan atas keakurasian data, penggunaan rumus, dan metode perhitungannya dari yang sederhana, sedang dan panjang, serta koreksi-koreksi data yang digunakannya. Metode hisab dibagi tiga macam, yaitu 1) ilmu hisab *hakiki takribi*, 2) ilmu hisab *hakiki tahkiki*, dan 3) ilmu hisab *hakiki kontemporer*.⁴⁹

1. Hisab Hakiki Takribi

Kelompok metode hisab ini mempergunakan data bulan dan matahari berdasarkan data tabel *Ulugh Beg* dengan proses perhitungan yang sederhana.⁵⁰ Hisab sistem ini hanya dengan cara tambah, kurang,

⁴⁸ *Ibid.* Hal, 728.

⁴⁹ Sriyatin Shodiq. 1995. *Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Kamariah Berbagai Motode Hisab, dalam Menuju Kesatuan Hari Raya*. Surabaya : Penerbit Bina Ilmu. Hal, 65-66.

⁵⁰ Ulugh Beg adalah daftar peredaran bulan dan matahari untuk mengetahui waktu awal bulan dan gerhana. Ulugh Beg ini diciptakan atau disusun oleh Mirzā Muhammad Tāraghay bin Shāhrukh Ulugh Beg adalah sultan Khorasan dan ahli astronomi dan matematika. Ulugh Beg dilahirkan di Soltaniyah, Iran.

kali, dan bagi, tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola.⁵¹ Yang termasuk kelompok ini antara lain adalah:

- a. *Sullam al-Nayyirain* oleh Muhammad Manshur bin Abd. Hamid bin Muhammad Damiri al-Betawi.
- b. *Tadhkirat al-Ikhwān* oleh KH. Dahlān al-Samarangi.
- c. *Bulūgh al-Waṭān* karya Aḥmad Dahlān bin ‘Abd Allah al-Samarani.
- d. *Fath al-Rauf al-Manān* karya Abū Hamdān ‘Abd al-Jafīl bin ‘Abd al-Ḥamīd Qudus.
- e. *Risālat al-Qamarayn* karya Muḥammad Nawawi Yūnus al-Kadiri.
- f. *Risālat Syams al-Hilāl* karya Nūr Ahmad Shadiq bin Saryani al-Jepara.
- g. *Al-Qawāid al-Falakiyah* karya ‘Abd Fath al-Sa’id al-Thūhī al-Falaki.
- h. Hisab Matahari dan Bulan karya Anwar Katsir Malang.
- i. *Awāil al-Falakiyah* karya Sriyatin Shodiq Surabaya.
- j. *Faidh al-Karīm al-Rauf* karya Ahmad Ghāzali Muḥammad Fath Allah, Pamekasan.

2. Hisab Hakiki Tahkiki

Kelompok metode ini mempergunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan mempergunakan perhitungan yang relatif lebih rumit daripada kelompok pertama, serta memakai ilmu ukur segitiga bola.⁵² Yang termasuk kelompok ini antara lain:

⁵¹ Sriyatin Shodiq. *Op.cit.* Hal, 66.

⁵² *Ibid.* Hal, 67.

- a. *Al-Maṭla' al-Sa'īd fī Ḥisābāt al-Kawākib 'ala Rushd al-Jadīd* karya Shaikh Ḥusayn Zaid al-Misrī.
- b. *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah* karya Zubīr 'Umar al-Jaylanī Salatiga.
- c. *Natāij Muntahā al-Aqwāl* karya Shaikh Aḥmad Ash'arī al-Basuruani.
- d. *Risālat Badī'ah al-Mithāl* karya Muḥammad Ma'sūm bin 'Ali (Jombang).
- e. *Hisab Urfi & Hakiki* karya Muhammad Wardan Yogyakarta.
- f. *Nūr al-Anwār* karya Nūr Ahmad SS Jepara.
- g. *Ittifaq Thāt al-Bayn* karya Muḥammad Zubīr 'Abd al-Karīm al-Gresiki.
- h. *Irshād al-Murīd* karya Aḥmad Ghāzali Muḥammad Fath Allah, Pamekasan.
- i. *Tsamrat al-Fikār* karya Ahmad Ghāzali Muḥammad Fath Allah, Pamekasan.
- j. *Al-Durru al-Anieq* karya Ahmad Ghāzali Muḥammad Fath Allah, Pamekasan.

3. Hisab Hakiki Kontemporer

Kelompok metode ini mempergunakan tabel-tabel dan data mutakhir yang sudah di koreksi, serta mempergunakan perhitungan yang panjang dan memakai rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola.⁵³ Yang termasuk kelompok ini antara lain:

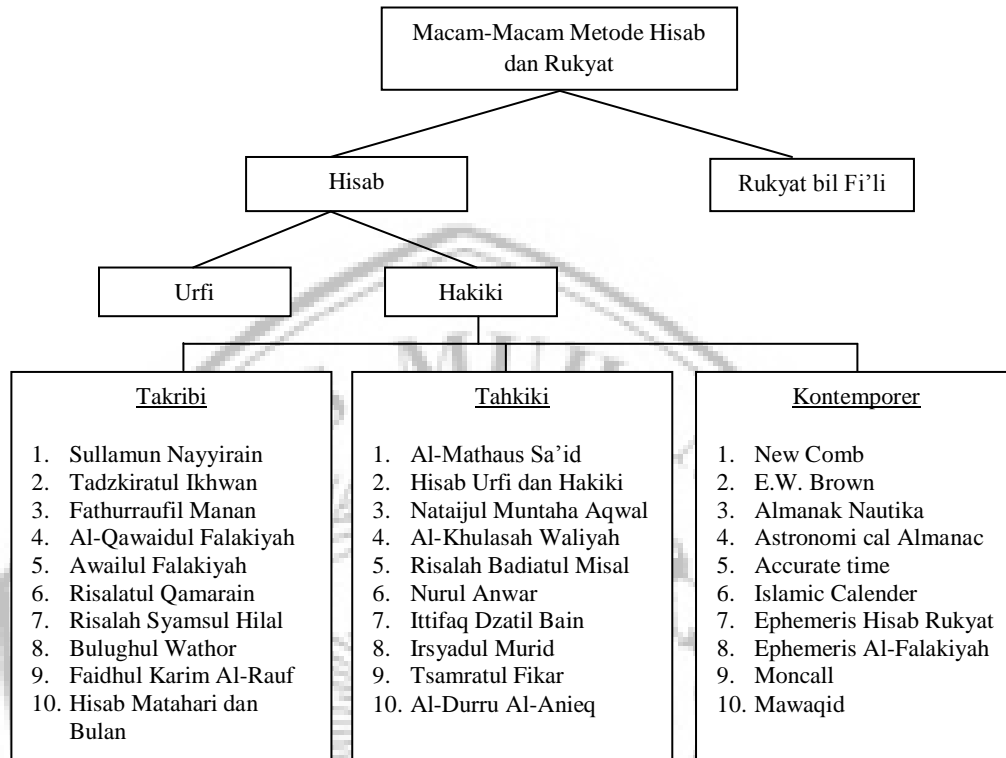
- a. Newcomb karya Abdur Rachim Yogyakarta.

⁵³ *Ibid.* Hal, 67-68.

- b. EW. Brown karya Tengku Muhamad Ali Muda Medan.
- c. *Islamic Calender* karya Mohammad Ilyas Malaysia.
- d. *Astronomical Tables of the Sun, Moon, and Planets* karya Jean Meeus-Belgia.
- e. Almanac Nautica/Alamanak Nautika disalin Dinas Oseonografi Angkatan Laut- Jakarta.
- f. Ephemeris Hisab Rukyat disusun BHR/Kementerian Agama RI- Jakarta.
- g. *Mooncall* karya Mounzur-Perancis.
- h. *Accurate times* karya Muhammad Odeh-Yordan.
- i. Mawaqit karya Khafid-Jakarta.
- j. Ephemeris Al-Falakiyah karya Sriyatin Shodiq-Surabaya



Bagan 3
Sistem dan Aliran Penentuan Awal Bulan Kamariah



Sumber data : Sriyatin Shodiq. *Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Kamariah Berbagai Motode Hisab*. 1995.

D. Kriteria Awal Bulan Kamariah

1. Waktu Ijtimak

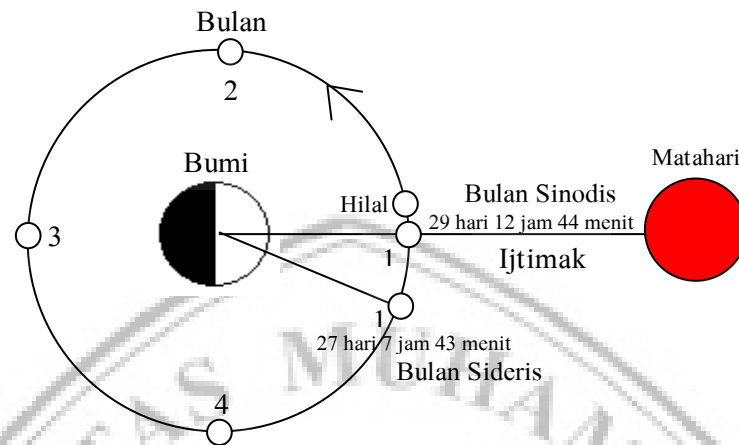
Dalam astronomi dijelaskan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi. Satu kali putaran bulan mengelilingi bumi dengan acuan (pengamat) bintang yang jauh yang disebut satu bulan sideris (*sidercal month*) ditempuh dalam waktu 27.321582 hari = 27 hari 7 jam 43 menit 11.5 detik, disebut ijtimak pertama, namun bulan belum sempurna peredarannya, dan belum dapat dijadikan acuan awal bulan. Satu bulan sideris ini tepat sama dengan satu kali rotasi bulan terhadap sumbunya,

sehingga selalu terlihat wajah bulan yang sama. Ketika bulan bergerak mengelilingi bumi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Setelah satu bulan sideris dilalui, dibutuhkan tambahan waktu 2 hari, agar bulan tepat satu bulan Kamariah didasarkan kepada waktu yang berselang dari dua ijtimak. Satu kali putaran bulan mengelilingi bumi dengan acuan (pengamat) matahari ditempuh dalam waktu 29,530589 hari = 29 hari 12 jam 44 menit 2.9 detik, disebut ijtimak kedua,⁵⁴ peredaran bulan sudah sempurna dan dapat dijadikan acuan awal bulan. Periode peredaran bulan seperti ini disebut satu periode bulan sinodis (*the synodic month, shahr iqtirany*) inilah dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Posisi dan keadaan peristiwa ijtimak pada garis lurus bujur astronomi yaitu Matahari-Bulan-Bumi pada dalam posisi satu bulan sinodis peristiwa ijtimak kedua, seperti gambar di bawah ini.

⁵⁴ Mohammad Ilyas. 1997. *Sistem Kalender Islam Dalam Perspektif Astronomi*. Kualalumpur : Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka. Hal, 20.

Gambar 1
Peristiwa Ijtimak dan Posisi Bulan Sideris dan Sinodis



Sumber data : Sriyatin Shodiq. *Wacana Fikih Hisab Rukyat Dan Kalender Islam*. 2012.

Di kalangan ahli hisab, kriteria ijtimak sebagai penetapan awal bulan masih dijumpai beragam kriteria.⁵⁵ Ijtimak bila dihubungkan dengan keadaan dan posisi keberadaan hilal ada dua aliran besar, yaitu : *pertama*, aliran ijtimak dihubungkan dengan waktu ada lima cabang, yaitu: 1) ijtimak *qabla al-gurub* ; 2) ijtimak *qabla al-fajri* ; 3) ijtimak saat terbit matahari; 4) ijtimak saat tengah hari; 5) ijtimak saat tengah malam.⁵⁶ Acuan waktu ijtimak saja untuk penentuan awal bulan tidak cukup, masih perlu parameter dan ketentuan lain, misalnya ijtimak dihubungkan dengan posisi keberadaan hilal, atau ijtimak dihubungkan dengan penampakan hilal. Namun, banyak juga para ahli hisab hanya mencukupkan waktu ijtimak sebagai batas penentuan akhir dan awal bulan sebagai acuan penentuan awal bulan Kamariah.

⁵⁵ Susiknan Azhari. 2008. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. Hal, 94-97.

⁵⁶ *Ibid*.

Kedua, aliran ijtimak dihubungkan dengan posisi keberadaan dan penampakan hilal di atas ufuk yang dijadikan dasar penentuan awal bulan ada enam cabang, yaitu : 1) awal bulan Kamariah dimulai sejak saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak; 2) awal bulan Kamariah dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan hilal sudah di atas ufuk; 3) awal bulan Kamariah dimulai setelah terjadi ijtimak dan hilal sudah di atas ufuk hakiki; 4) awal bulan Kamariah dimulai setelah terjadi ijtimak dan hilal sudah di atas ufuk hissi; 5) awal bulan Kamariah dimulai setelah terjadi ijtimak dan hilal sudah di atas ufuk mar'i; 6) awal bulan Kamariah dimulai setelah terjadi ijtimak dan hilal sudah Imkanur Rukyat.⁵⁷

Pada dasarnya semua aliran hisab hakiki baik hisab hakiki takribi, tahkiki dan astro-kontemporer mendalilkan bahwa waktu ijtimak merupakan waktu yang sangat penting untuk mengetahui batas akhir dan awal bulan, tanpa mengetahui waktu ijtimak akan kesulitan untuk menentukan awal bulan, apalagi yang berpedoman rukyat. Oleh karena itu, pada awal-awal perkembangan hisab di Indonesia para ahli hisab mendalilkan bahwa waktu ijtimak *qabla al-ghurub* merupakan waktu yang penting untuk dijadikan acuan : *pertama*, mengetahui batas akhir dan awal bulan yang sedang berjalan. *Kedua*, awal bulan dimulai sejak setelah matahari terbenam (*ghurub*). Jika waktu ijtimak terjadi setelah terbenam

⁵⁷ *Ibid.*

matahari, maka umur bulan digenapkan atau di sempurnakan menjadi 30 hari (*istikmal*).

2. Adanya Hilal

Kata “hilal” bentuk tunggal dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah saw berkaitan dengan perintah melihat hilal:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا
رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ
وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ لِهَلَالِ رَمَضَانَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada saya Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)". Dan berkata, selainnya dari Al Laits telah menceritakan kepada saya 'Uqail dan Yunus: "Ini maksudnya untuk hilal bulan Ramadan".⁵⁸

Sedangkan kata “hilal” dalam bentuk plural *al-Ahillah* dijelaskan dalam firman Allah swt:

⁵⁸ HR. Bukhari no. 1767; HR. Muslim no. 1799 dan no 1808

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَابِهَا ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: “Itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji”. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁵⁹

Sedangkan kata “hilal” menurut para ahli bahasa dan fikih sebagaimana dijelaskan dalam beberapa pendapat sebagai berikut: hilal berarti awal atau sebagian dari bulan ketika telah tampak (*yuhillu*) oleh manusia. Dapat pula bermakna yang terlihat pada dua atau tiga malam pertama, atau sesuatu yang telah berbentuk (*yuhajjir*), dan dapat pula bermakna yang berkilau (bercahaya) di kegelapan malam.⁶⁰ Pendapat lain menegaskan bahwa setelah terjadinya hilal maka disebut '*shahr*'. *Shahr* sendiri disebut demikian karena ia memang telah dikenal dan nyata (*mashhûr*), karena manusia mengetahui masuk dan keluarnya *shahr* itu. *Shahr* didefinisikan pula dengan hilal, karena ketika hilal telah tampak (*ahalla*) maka ketika itu ia disebut *shahr*.⁶¹

Menurut Kamus Al-Munawir makna hilal mempunyai dua belas makna, salah satunya: 1) bulan sabit; 2) bulan yang terlihat pada awal

⁵⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Op.cit.* Surat al-Baqarah (2) : 189

⁶⁰ Ibnu Manzhur. 2005. *Lisân a'l 'Arab*, Juz 15. Beirut: Dār al-Shadir. Hal, 83-84.

⁶¹ Ibnu Manzhur. 1409 H/1988 M. *Nathâr al-Azhâr fî al-Layl wa al-Nahâr*. Lebanon : Mu'assasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah. Hal, 234-235.

bulan.⁶² Menurut Kamus *Dictionary of Modern Written Arabic*, kata hilal, bentuk pluralnya *ahillah* atau *ahalil*, bisa berarti *newmoons* (bulan muda), atau *crescent* (bulan sabit).⁶³

Dalam surat al-Baqarah ayat 189 yang sudah disebutkan di atas, konsep hilal atau bulan sabit ditetapkan sebagai fenomena yang sangat penting dalam menetapkan masuknya bulan Kamariah. Oleh karena itu, ada atau tidak adanya hilal merupakan dasar atau rujukan untuk menentukan sudah masuk atau belum masuk bulan baru Kamariah.

Bulan sabit (*al-ahillah*), dalam ayat tersebut menurut astronomi adalah merupakan bagian dari fase-fase bulan yang dikenal dengan *crescent*,⁶⁴ atau *new moon*.⁶⁵ Hilal adalah merupakan salah satu bentuk semu bulan di antara fase-fase yang dialaminya selama dalam peredarannya mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Dengan demikian, ayat di atas mengindikasikan bahwa perubahan bentuk semu bulan merupakan pertanda perubahan waktu.

Dalam al-Qur'an surat Yūnus ayat 5 yang sudah di sebutkan di atas, dijelaskan kedudukan bulan dalam peredarannya melintasi rasi-rasi bintang ditunjukkan bahwa Allah swt telah menentukan manzilah-manzilah bagi bulan itu. Manzilah-manzilah bulan (*moon stations*) itu

⁶² Ahmad Warson Munawir. t.t. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Progreisf. Hal, 1616.

⁶³ Hans Wehr. 1994. *Dictionary of Modern Written Arabic*, cet. IV. Germany : Otto Harrassonitz. Hal, 1208.

⁶⁴ Baker. 1953. *Astronomy: A Texbook for University and College Students*, edisi ke-5. New York : D. Van Nostrand Company. Hal, 128.

⁶⁵ Jurdak. 1950. *Astronomical Dictionary: The Zodiac & Constellations*. Beirut : American Mission Press. Hal, 219-220.

tidak lain kecuali kedudukan bulan pada saat tertentu terhadap matahari dan bumi. Manzilah itu jumlahnya ada 28 yang senantiasa ditempati oleh bulan tiap-tiap hari dalam peredarannya mengelilingi bumi. Acuan dari manzilah-manzilah bulan itu adalah rasi-rasi bintang yang dilintasi bulan dalam peredarannya menempuh lintasan edarnya (falaknya).⁶⁶

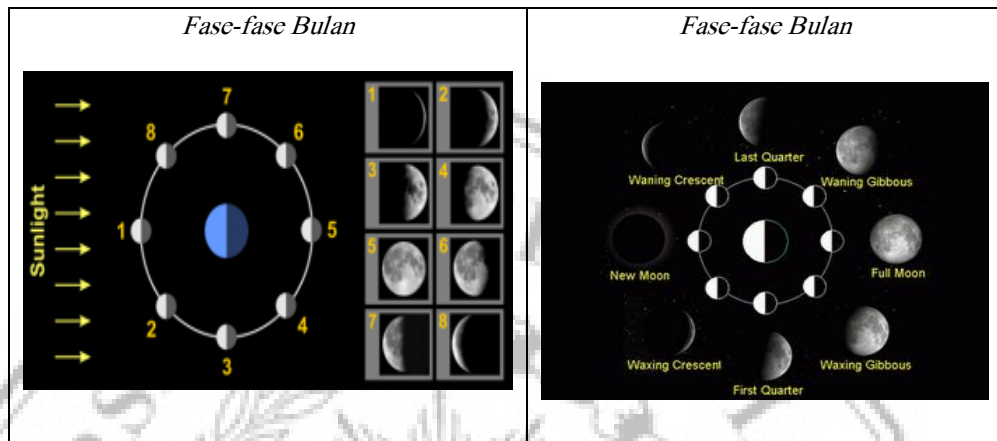
Pada sub bab ini ada 2 kalimat yang berbeda, yaitu 1) keberadaan hilal; dan 2) penampakan hilal, namun yang lebih penting kata “hilal”. Hilal merupakan acuan utama dalam hubungannya dengan penentuan awal bulan. Para ahli hisab dan astronomi dalam menentukan awal bulan pasti mencari hilal sebagai acuan pertanda awal bulan Kamariah.

Hilal adalah bagian dari *qamar*, mempunyai bentuk dan berubah setiap hari dari 1) cressent (*al-hilal*); 2) first quarter (*al-tarbi' al-awwal*); 3) first gibbous (*al-ahdab al-awwal*); 4). full moon (*al-badar*); 5) second gibbous (*al-ahdab al-tsani*); 6). second quarter (*al-tarbi' al-tsani*); 7) second cressent (*al-hilal al-tsani*); 8) wane (*al-muhaq*) atau juga disebut dengan fase konjungsi atau ijtimak. Dengan kata lain perubahan bentuk bulan atau fase-fase bulan adalah setelah penampakan hilal pada hari kesatu, kedua dan ketiga, kemudian berubah membesar ukurannya menjadi *qamar*, setelah itu berangsur-angsur peredarannya pada bentuk penampakan sempurna disebut “badar” (bulan purnama atau full moon), setelah bulan purnama kembali menyusut dan mengecil menjadi *qamar* lagi dan terus bertambah lebih mengecil berbentuk tipis seperti tandan tua

⁶⁶ *Ibid.* Hal, 220-222. Baca juga Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama. 1981. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Hal, 251.

(bulan tua atau bulan mati), setelah itu peredaran terakhir disebut *muhaq* atau disebut konjungsi atau ijtimak.

Gambar 2
Orbit Bulan Mengelilingi Bumi



Sumber data : [google.co.id/search-gambar](https://www.google.co.id/search-gambar)

Hilal sebagai acuan dalam penentuan awal bulan Kamariah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. di atas.

E. Macam-Macam Kriteria Awal Bulan Kamariah

1. Ijtimak *Qabla al-Ghurub*

Pada prinsipnya kriteria ini pergantian awal bulan Kamariah dengan menjadikan ijtimak sebagai ketentuan pergantian awal bulan dengan memberikan batas terjadinya ijtimak sebelum terbenam matahari.⁶⁷ Jika ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru, sedangkan jika ijtimak terjadi setelah terbenam matahari maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari

⁶⁷ Sriyatin Shodiq. *Op.cit.* Hal, 73.

terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Sistem ini berpegang kepada ketentuan bahwa pergantian hari atau tanggal menurut kalender Hijriah dimulai dari saat terbenam matahari sampai dengan terbenam matahari berikutnya. Dengan demikian, menurut pandangan ini ijtima' adalah pemisah diantara dua bulan Kamariah.

2. Wujudul Hilal

Keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta tahun 2000 tentang penetapan awal bulan Kamariah dan matlak, antara lain dinyatakan, yaitu 1) hisab hakiki dan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Kamariah memiliki kedudukan yang sama; 2) hisab hakiki yang digunakan dalam penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal; 3) matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada wilayatul hukmi.⁶⁸

Kriteria wujudul hilal, jika pada tanggal 29 Syakban dalam kalender Hijriyah atau hari terjadinya ijtima'/konjungsi telah memenuhi 3 (tiga) kondisi, yaitu 1) telah terjadi ijtima' (konjungsi); 2) ijtima' (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari tenggelam; 3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud), maka keesokan harinya telah dinyatakan sebagai awal bulan Kamariah.⁶⁹

Cara menentukannya sangat mudah yaitu dengan menempatkan matahari pada posisi terbenam, lalu ditentukan posisi bulan. Bila bulan berkedudukan diatas ufuk itu berarti menunjukkan bahwa bulan sudah

⁶⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Op.cit.* Hal, 78.

⁶⁹ *Ibid.* Hal, 78

berada di sebelah timur matahari. Situasi demikian menunjukkan bahwa bulan baru Kamariah sudah mulai atau dengan kata lain hilal sudah wujud.

3. Imkanur Rukyat MABIMS

Keputusan Menteri Agama dari 4 (empat) negara yaitu Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia, dan Singapura (MABIMS) dalam penyelarasan rukyat dan kalender (taqwim) Hijriah yang ke-4 di Bandar Seri Begawan, Brunai Darussalam tanggal 17-18 Shafar 1414/tanggal 6-7 Agustus 1993, antara lain sebagai berikut: untuk menentukan taqwim Hijriah dilakukan perhitungan hisab yang berpedoman kepada ketinggian bulan minimal 2 derajat untuk seluruh wilayah negara anggota MABIMS, jarak sudut matahari dan bulan minimal 3 derajat dan umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak.⁷⁰

Keputusan musyawarah Ulama, ahli hisab dan ormas Islam tentang kriteria Imkanur Rukyat, tanggal 24-26 Maret 1998/25-27 Zulkaidah 1418 di Hotel USSU di Cisarua 1998, antara lain sebagai berikut: had/batas minimal ketinggian yang dijadikan pedoman Imkanur Rukyat dan diterima oleh hisab falak shar'i di Indonesia serta Negara-negara MABIMS adalah dua derajat dan umur minimal 8 jam dari saat ijtimak.⁷¹

Keputusan musyawarah Imkanur Rukyat antara pimpinan ormas Islam, MUI dan Pemerintah, tanggal 28 September 1998 M/7 Jumadil

⁷⁰ Departemen Agama RI. 1999/2000. *Jurnal Hisab Rukyat*. Jakarta : Ditjen Binbaga Islam Ditbinbapera Islam. Hal, 76.

⁷¹ *Ibid.*

Akhir 1419 H di Jakarta, antara lain sebagai berikut : 1) kesaksian rukyatul hilal dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak ijtima' ke *ghurub* matahari minimal 8 jam; 2) kesaksian rukyat hilal tidak dapat diterima, apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal; 3) apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.⁷²

Keputusan lokakarya mencari kriteria format awal bulan di Indonesia pada tanggal 19-21 September 2011 di Hotel Grand USSU Bogor Jawa Barat,⁷³ antara lain sebagai berikut : 1) memantapkan implementasi keputusan USSU tahun 1998 dengan perubahan sebagai berikut: *pertama*, kriteria yang digunakan dalam penyusunan kalender Hijriah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab hakiki *bit-tahqiq* memenuhi kriteria imkanur rukyat; 2) kriteria imkanur rukyat yang dimaksud pada angka pertama di atas adalah dengan kriteria : a) tinggi hilal minimal 2 derajat; b) jarak sudut matahari dan bulan minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam; 3) khusus untuk penetapan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah digunakan kriteria sebagaimana angka kedua di atas dan didukung bukti empirik terlihatnya

⁷² *Ibid.*

⁷³ Catatan Sriyatin Shodiq sebagai peserta dan tim perumus pada Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia. Lokakarya ini sebagai tindak lanjut dan memperingati atau mengingat keputusan musyawarah ulama ahli hisab dan ormas Islam tentang kriteria imkanur rukyah di Indonesia tanggal 24-26 Maret 1998 M/25-27 Zulkaidah 1418 H di Hotel Ussu Cisarua Bogor. Ada sepuluh rumusan dan kesimpulan yang dihasilkan pada musyawarah ini, antara lain pada nomor tiga : had/batas minimal ketinggian yang dijadikan pedoman imkanur rukyah dan diterima oleh ahli hisab falak syariah di Indonesia serta negara-negara MABIMS adalah dua derajat dan umur Bulan minimal delapan jam dari saat ijtima', perlu dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang sistematis dan ilmiah.

hilal; 4) penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah dilakukan dalam sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.⁷⁴

4. Rukyat Global

Keputusan Konferensi Penyatuan Kalender Islam Internasional di Istanbul Turki pada tanggal 28 sampai 30 November 1978 sebagai berikut:

- a. Penetapan awal bulan Hijriah menurut Syariat Islam ialah rukyat.
- b. Para ahli hisab yang melakukan perhitungan kedudukan hilal pada tiap-tiap awal bulan Hijriah hendaknya dipakai pedoman kedudukan bulan di atas ufuk pada saat matahari tenggelam.
- c. Syarat fundamental hilal dapat diobservasi jarak titik pusat bulan dan matahari tidak kurang 7 derajat dan 8 derajat. Tinggi bulan pada saat matahari tenggelam, tidak kurang dari 5 derajat.
- d. Hasil rukyat dari sesuatu tempat mengikat juga kepada seluruh tempat yang berada di permukaan bumi.⁷⁵

5. Matlak dan Wilayatul Hukmi

Teori matlak berasal dari pemahaman tekstual hadis yang disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Kuraib:

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ
فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ

⁷⁴ Catatan Sriyatin Shodiq sebagai peserta, selengkapnya baca Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia pada tanggal 19-21 September 2011 di Hotel Grand USSU Bogor Jawa Barat.

⁷⁵ Departemen Agama RI. 2010. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Hal, 44-45.

لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نَكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Bahwa Ummul Fadl telah mengutusnyanya untuk menemui Muawiyah di Syam. Kuraib berkata, "Aku memasuki Syam lalu menyelesaikan urusan Ummul Fadhl. Ternyata Bulan Ramadan tiba sedangkan aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Setelah itu aku memasuki kota Madinah pada akhir Bulan Ramadan. Ibnu 'Abbas lalu bertanya kepadaku dan menyebut persoalan hilal'. Dia bertanya, 'Kapan kalian melihat hilal?' Aku menjawab, 'Kami melihatnya pada malam Jum'at.' Dia bertanya lagi, 'Apakah kamu sendiri melihatnya?' Aku jawab lagi, 'Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Lalu mereka berpuasa, begitu pula Muawiyah.' Dia berkata lagi, 'Tapi kami (di Madinah) melihatnya pada malam Sabtu. Maka kami terus berpuasa hingga kami menyempurnakan bilangan tiga puluh hari atau hingga kami melihatnya.' Aku lalu bertanya, 'Tidak cukupkah kita berpedoman pada ru'yat dan puasa Muawiyah?' Dia menjawab, 'Tidak, (sebab) demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami'.⁷⁶*

Hadis yang diriwayatkan Kuraib ini dijadikan sebagai dalil bagi absahnya perbedaan awal dan akhir Ramadhan karena perbedaan matlak (tempat lahirnya bulan). Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat, jika satu kawasan melihat bulan, maka daerah dengan radius 24 *farsakh* dari pusat rukyat bisa mengikuti hasil rukyat daerah tersebut. Sedangkan daerah di luar radius itu boleh melakukan rukyat sendiri, dan tidak harus mengikuti hasil rukyat daerah lain.

⁷⁶ HR. Muslim no. 1819; Abu Dawud no. 1985; al-Tirmidzi 629; al-Nasa'i no. 2084; Ahmad no. 2653

Dalam kalangan fuqaha teori matlak dikenal berhubungan dengan penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah, serta pelaksanaan ibadah Haji di Arafah. Kemudian muncul perbedaan pendapat tentang konsep matlak. Di Indonesia dikenal dan diberlakukan matlak *wilayat al-hukmi*.⁷⁷ Matlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah matlak wilayatul hukmi yang digunakan Indonesia, yakni kesatuan wilayah dalam kekuasaan politik negara Indonesia.

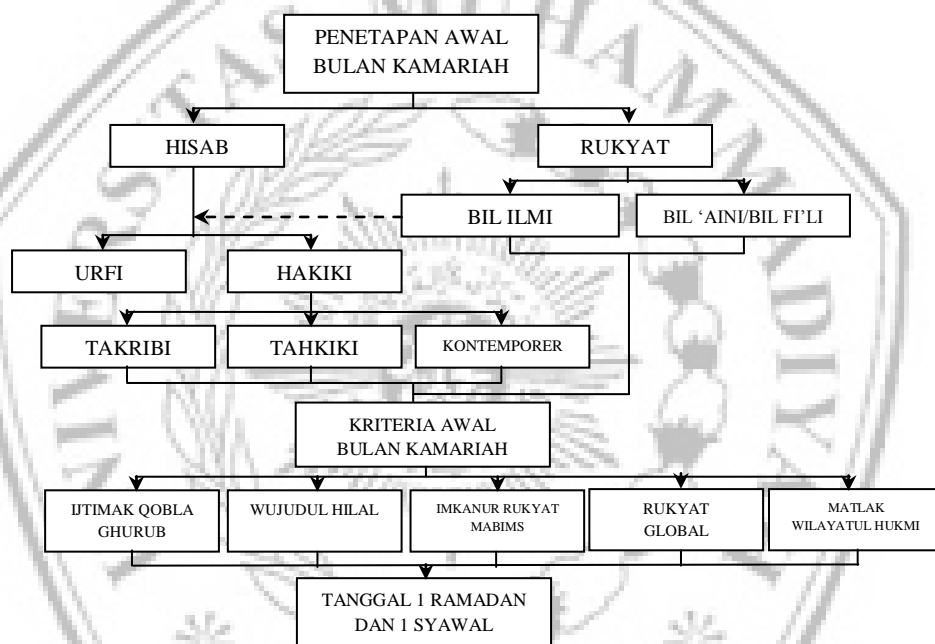
Indonesia tidak mengikuti mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur namun Indonesia melakukan ijtihad dengan membuat "mazhab baru", yang disebut matlak wilayatul hukmi, yaitu kawasan seluruh wilayah kesatuan politik yang berlaku untuk seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan Musyawarah MABIMS bahwa Indonesia dan kawasan wilayah negara Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam dalam satu matlak. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 seluruh wilayah Indonesia satu matlak, sedangkan keputusan Majelis Tarjih ke-25 tahun 2000 seluruh wilayah Indonesia satu matlak, dan dapat menerima matlak

⁷⁷ *Wilayat al-hukmi* adalah wilayah kesatuan kekuasaan politik negara untuk menyatukan kesamaan dalam penentuan awal-awal bulan Kamariah, khususnya penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, namun sering terjadi problem ketika garis batas tanggal antara wilayah negara Indonesia bertepatan atau mendekati wilayah negara Arab Saudi, apalagi berkaitan hari Arafah, karena masih banyak umat Islam atau komunitas Islam Indonesia mengikuti penetapan pemerintah Arab Saudi. Dalam penelitian penulis, praktik *wilayat al-hukmi* untuk keputusan Menteri Agama yang berkaitan penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah tidak ada masalah karena isbat Menteri Agama menganut madhhab rukyat. Namun menjadi problem bagi yang menganut madhhab hisab hakiki wujudul hilal, seperti Muhammadiyah karena bila wilayah Indonesia terlewati garis batas tanggal kamariah, di wilayah belahan barat posisi hilal sudah positif di atas dan wilayah belahan timur posisi hilal masih di bawah ufuk, maka konsekwensinya wilayah belahan timur harus mengikuti wilayah belahan barat.

lain searah bujur kawasan. Keputusan Mukhtar NU di Lerboyo Kediri 2006 Indonesia satu matlak dan tidak bisa menerima matlak global.

Dalam politik negara Indonesia mengikuti matlak wilayahul hukmi dengan faktor utama penyatuan wilayah geografis NKRI sejalan dengan fatwa MUI.

Bagan 4
Penetapan Awal Bulan Kamariah



Sumber data : Sriyatin Shodiq. *Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Tahun*. 2004

F. Pelaksanaan dan Tata Cara Rukyatul Hilal di Indonesia

1. Dasar Hukum

Hukum Islam agar dapat berlaku di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Ketidak seragaman dalam menentukan apa yang disebut hukum Islam serta tidak adanya kejelasan bagaimana

menjalankan Syariat menyebabkan ketidak mampuan menggunakan jalan dan alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan Undang-undang lainnya.⁷⁸

Landasan yuridis adalah tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat di satu sisi, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Dan pada sisi yang lain dinyatakan bahwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu tempat dan keadaan karena masyarakat itu selalu berubah (kaidah fiqhiyyah).⁷⁹

Berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa:

- (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
- (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor: KMA/095/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, yang antara lain dalam

⁷⁸ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. 2002. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Hal, 132-133.

⁷⁹ Dr. H. Habiburrahman, M. Hum. *Op.cit*. Hal, 2.

konsiderannya menyatakan: bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas (ketentuan Pasal 52A Undang-undang tentang Pengadilan Agama dan keperluan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal secara nasional), dipandang perlu memberikan izin kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melaksanakan sidang isbat rukyatul hilal dengan hakim tunggal.⁸⁰

2. Ketentuan Pelaksanaan Rukyatul Hilal

- a. Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan obsevasi hilal dan merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan.
- b. Pemohon/Pelapor sidang isbat rukyatul hilal adalah pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Kantor Departemen Agama.
- c. Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim.
- d. Saksi adalah orang yang mengetahui dan menyaksikan proses pelaksanaan sidang isbat dan pengangkatan sumpah syahid/ perukyat.
- e. Hakim dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang menyelenggarakan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal.
- f. Isbat hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyatul hilal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.

⁸⁰ *Ibid.* Hal, 4.

- g. Penetapan (isbat) rukyatul hilal adalah alat bukti dan bahan pertimbangan dalam sidang isbat Menteri Agama dalam menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.
- h. Penetapan (isbat) awal bulan Ramadan dan Syawal secara nasional ditetapkan oleh Pemerintah cq. Menteri Agama, dan penetapan tersebut berlaku secara umum.
- i. Penetapan (isbat) 1 Ramadan dan 1 Syawal merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- j. Bahwa oleh karena itu, penetapan kesaksian rukyatul hilal tersebut diperlukan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 (satu) Ramadan, Syawal dan Zulhijah secara nasional, maka perlu diselenggarakan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal dengan cepat dan sederhana.
- k. Bahwa permohonan isbat kesaksian rukyatul hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan (*voluntair*) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.⁸¹

3. Prosedur Pencatatan Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal

Dalam melakukan kesaksian rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan Kamariah, harus kita ketahui prosedur-prosedur pencatatan sidang

⁸¹ Baca *Pedoman Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal, dalam Pendahuluan*. Hal, 1.

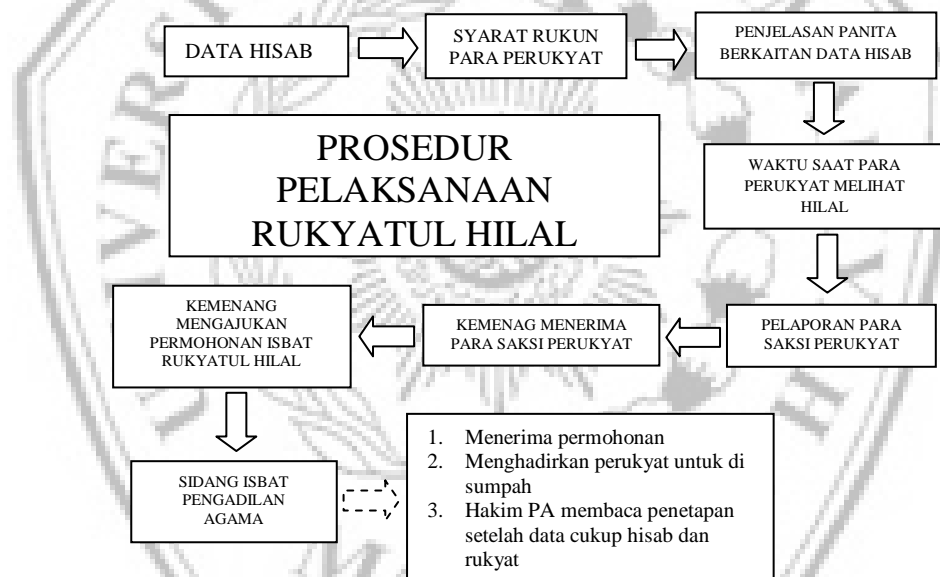
isbat kesaksian rukyatul hilal. Adapun prosedur pencatatan sidang isbat, antara lain:

- a. Sidang isbat rukyatul hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyatul hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Pemohon dan Pelapor (Kantor Departemen Agama) mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyatul hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyatul hilal.
- c. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas Kantor Departemen Agama.
- d. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Isbat Rukyatul Hilal.
- e. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
- f. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
- g. Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Departemen Agama mengajukan permohonan, atau sebelum pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal.

- h. Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyatul hilal.
- i. Waktu rukyatul hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.
- j. Setelah hakim memeriksa syahid/perukyat dan apabila berpendapat syahid/perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim tersebut memerintahkan syahid/perukyat mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: *Ashadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan..... tahun ini.*
- k. Pengangkatan sumpah para syahid/perukyat didampingi 2 (dua) orang saksi.
- l. Setelah hakim menyumpah syahid/perukyat kesaksian rukyatul hilal, selanjutnya hakim menetapkan/mengitsbatkan kesaksian rukyat tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
- m. Penetapan/isbat kesaksian rukyatul hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyatul hilal (Kantor Departemen Agama Setempat). Selanjutnya petugas Departemen Agama melaporkan penetapan tersebut kepada panitia sidang isbat Nasional yaitu Kementerian Agama RI di Jakarta.

- n. Demi kelancaran pelaksanaan persidangan isbat kesaksian rukyatul hilal, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar berkoordinasi dengan kantor Departemen Agama Setempat dan panitera atau petugas yang ditunjuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan persidangan, seperti formulir permohonan, berita acara, penetapan, al-Qu'ran, toga hakim dan keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.⁸²

Bagan 5
Prosedur Pelaksanaan Rukyatul Hilal



Sumber data : Sriyatin Shodiq. Presentasi Persiapan Sidang Isbat Awal Ramadan dan Syawal tahun 2003

⁸² Mahkamah Agung RI. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi. Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Hal, 154-155.

4. Syarat Rukun Kesaksian Rukyatul Hilal

Dalam setiap melakukan kesaksian rukyatul hilal, harus memenuhi syarat-syarat dan rukun kesaksian. Saksi dalam kesaksian rukyat dibedakan 2 (dua) macam :

- a. Saksi 1 adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melaporkannya disebut syahid/perukyat.⁸³
- b. Saksi 2- adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim.⁸⁴

Sedangkan yang membacakan Syahadah dalam isbat kesaksian rukyatul hilal didepan hakim adalah saksi nomor 1. Ada beberapa persyaratan syahid/perukyat hilal, yaitu :

1. Syarat Formil :
 - a. Akil balig atau sudah dewasa.
 - b. Beragama Islam.
 - c. Laki-laki atau perempuan.
 - d. Sehat Akalnya.
 - e. Mampu melakukan rukyat.
 - f. Jujur, adil dan dapat dipercaya.
 - g. Jumlah perukyatan lebih dari satu orang.

⁸³ Baca *Pedoman Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal, dalam Syahadah Kesaksian Rukyatul Hilal*. Hal, 3.

⁸⁴ *Ibid*.

- h. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyatul hilal.
- i. Sumpah kesaksian rukyatul hilal di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan di hadiri 2 (dua) orang saksi.⁸⁵

2. Syarat Materiil :

- a. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
- b. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit / horizon saat hilal dapat dilihat.
- c. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.⁸⁶

G. Macam-Macam Alat Bukti dalam Kesaksian Rukyatul Hilal

Dalam setiap pelaksanaan rukyatul hilal bukti kesaksian merupakan pembuktian yang wajib dilaksanakan. Alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam Pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.* Hal, 4

Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.⁸⁷

Dalam studi ini hakim Pengadilan Agama menggunakan 4 (empat) alat bukti untuk bisa menetapkan penetapan dalam isbat rukyatul hilal. Alat bukti tersebut antara lain:

1. Alat Bukti Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.⁸⁸ Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi syahid/perukyat haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri dalam pelaksanaan rukyatul hilal, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian.

Syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut:⁸⁹

a. Orang yang Cakap

Orang yang cakap disini adalah *pertama* memahami ilmu falak data hisab dan rukyatul hilal, dan *kedua* orang yang sudah cukup

⁸⁷ M. Yahya Harahap, S.H. 2010. *Hukum Acara Perdata*, cet.10. Jakarta : Sinar Grafika. Hal, 554. Baca juga Deasy Socikromo. 2014. *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jurnal Vol. II/ No. 1/ Januari-Maret/ 2014. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi Manado. Hal, 127.

⁸⁸ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 7. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. Hal, 166.

⁸⁹ Therecsya Aldina. *Teori Pembuktian & Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata, Pidana, & PTUN*. Diakses pada tanggal 13 September 2017. Download di http://www.academia.edu/12280533/Teori_Pembuktian_dalam_Hukum_Acara_Perdata_Hukum_Acara_Pidana_dan_PTUN?auto=download. Hal, 7-8.

berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Vide pasal 145 ayat (3) HIR yang berbunyi: *anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun*. Dan pasal 1912 KUH Perdata berbunyi: *Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi*.

b. Keterangan Disampaikan di Sidang Pengadilan

Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 144 ayat (1) HIR yang berbunyi: *Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang*. Dan pasal 1905 KUH Perdata yang berbunyi: *Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya*. Dan saksi minimal 2 (dua) orang saksi (*unus testis nullus testis*) syahid/perukyat rukyatul hilal, hal ini termaktub dalam pasal 169 HIR yang berbunyi: *Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum*. Menurut ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukti, apabila keterangan dari syahid/perukyat yang disampaikan di depan persidangan dalam isbat kesaksian rukyatul hilal.

c. Diperiksa Satu Persatu

Dalam ketentuan ini, prinsip yang harus terpenuhi supaya keterangan saksi syahid/perukyat rukyatul hilal menjadi sah sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan dengan cara, *pertama* menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu sesuai pasal 171 RBG: *Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang, kedua* memeriksa identitas saksi, *ketiga* menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara sesuai Vide pasal 144 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: *Ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat berdiam atau tempat tinggal masing-masing saksi, ia akan menanyakan pula, adakah mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat keberapa; selain itu, akan ditanyakannya pula, adakah mereka menjadi pembantu salah satu pihak.*

d. Mengucapkan Sumpah

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah di depan hakim Pengadilan Agama dalam isbat rukyatul hilal, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya, yakni berkata benar. Dalam ketentuan ini merupakan kewajiban saksi syahid/perukyat untuk bersumpah atau berjanji menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya, hal ini sesuai pasal 1911 KUH Perdata berbunyi: *Tiap saksi wajib bersumpah*

menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.

e. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan

Menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan data hisab dan rukyatul hilal dan alasan serta saksi syahid/perukyat juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri pada saat pelaksanaan rukyatul hilal sedang berlangsung sesuai dengan pasal 171 ayat (1) HIR berbunyi: *Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.* Dan pasal 1907 KUH Perdata yang berbunyi: *Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.*

f. Saling Persesuaian

Ketentuan ini, saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan data hisab dan rukyatul hilal, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta pada saat berlangsungnya pengamatan rukyatul hilal di lapangan. Dalam hal ini sesuai pasal 1908 KUH Perdata yang berbunyi: *Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama*

lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada perikehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

2. Bukti Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan.⁹⁰ Jadi dalam ketentuan ini, syahid/perukyat benar-benar mengetahui data hisab dan mengaku melihat hilal pada saat rukyatul hilal.

3. Alat Bukti Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka hakim.⁹¹

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa kepada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.⁹² Dalam hal ini, apabila syahid/perukyat benar-benar melihat hilal pada saat rukyatul hilal, maka akan di sumpah di depan muka hakim tunggal saat persidangan isbat kesaksian rukyatul hilal.

4. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata.⁹³ Hal ini sejalan dengan pengertian yang termaktub dalam pasal 1915 KUH Perdata yang berbunyi: *Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.*

Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama menggunakan persangkaan dalam mengisbatkan rukyatul hilal untuk penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal.

H. Penetapan Hakim Pengadilan Agama dan Isbat Pemerintah

1. Penetapan Hakim Pengadilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada ayat (1) : *Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan,*

⁹² Dr. Wahyu Muljono, S.H., Kn. t.t. *Teori dan Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Hal, 117.

⁹³ Prof. Subekti, S.H. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 31. Jakarta : PT Intermasa. Hal, 181.

dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Penetapan (Isbat) hakim yang dimaksud adalah kewenangan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menetapkan isbat rukyatul hilal awal bulan Kamariah, sebagaimana termaktub dalam pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹⁴

Secara yuridis, ketentuan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut menjadi dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yudikatif di Indonesia untuk menetapkan (mengisbatkan) rukyatul hilal. Adapun tatacara pelaporan, pemeriksaan, penyempurnaan dan penetapan kesaksian rukyatul hilal (isbat) oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/095/X/2006 dan teknis administrasi operasionalnya diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, diperlukan aturan

⁹⁴ Selengkapnya baca Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

khusus (hukum acara), sehingga memiliki kepastian dan kekuatan hukum.⁹⁵

2. Isbat Pemerintah Tentang Penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁹⁶

Menurut Rasyid Ridla dalam Tafsir al-Manar, menjelaskan surat al-Nisa' ayat 59 yang berkaitan dengan penjelasan *Ulil Amri* :

إِنَّ اجْتِهَادَ أُولِيَ الْأَمْرِ هُوَ الْأَصْلُ الثَّلَاثُ مِنْ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ وَ إِنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا رَأَيْتُمْ وَجَبَ عَلَى الْأُمَّةِ وَعَلَى
حُكَّامِهَا الْعَمَلُ بِهِ

Artinya: *Itijihad Ulil Amri adalah pokok yang ketiga dari pokok syari'at Islam dan apabila mereka bersepakat pendapatnya wajib terhadap umat dan para ahli hukum mengamalkannya.*⁹⁷

Al-Mawardi menjelaskan dalam Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah, kewajiban mendirikan pemerintahan menurut syari'ah, yaitu perintah

⁹⁵ Baca Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/095/X/2006. Baca Juga Mahkamah Agung RI. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi. Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Hal, 179.

⁹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Op.cit.* Surat an-Nisā'(4): 59.

⁹⁷ Rashid Riḍa. t.t. *Tafsir Al-Manār*, juz III. Beirut : Dar al-Fikr. Hal, 102.

menyerahkan segala urusan kepada Ulil Amri, maka wajib bagi kita mematuhi Ulil Amri kita tersebut.⁹⁸ Menurut Qadhi Iyat dan ulama-ulama berpendapat bahwa ulama telah berijmak atas kewajiban patuh kepada pemimpin dalam hal bukan maksiat, dan haram patuh dalam kemaksiatan.⁹⁹

Pemerintahan dibentuk mempunyai tujuan, antara lain untuk menciptakan kemaslahatan rakyat, menjaga kesatuan umat, serta menghilangkan pertikaian dan perpecahan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa : Alasan (wajib patuh kepada pemimpin) adalah untuk kesatuan umat Islam, sementara tidak patuh akan menyebabkan kerusakan kondisi umat Islam dalam masalah agama dan dunia. Oleh karena itu, pemerintah wajib dipatuhi, karena jika tidak, akan terjadi kerusakan dalam umat. Sedangkan kerusakan adalah mudarat yang harus dihilangkan. Sebagaimana kaidah fikih **الضَّرَرُ يُزَالُ** (kemudaratn harus dihilangkan).¹⁰⁰

Cara menghilangkannya adalah dengan mematuhi pemerintah. Sesuai dengan kaidah fikih : “menghilangkan kerusakan lebih utama ketimbang mendatangkan kemaslahatan”.¹⁰¹

⁹⁸ Al-Mawardi. t.t. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut : Dar al-Kutub al-‘ilmiyah. Hal, 5.

⁹⁹ Imam al-Nawawi. 1994. *Ṣaḥīḥ Muslim bin Sharah al-Nawawi*, juz VI. Kairo : Dar al-Hadith, Hal, 469-470.

¹⁰⁰ Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)*. Yogyakarta : Penerbit TERAS. Hal, 109. Baca juga Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman. 2003. *Qawa'id Fiqhiyyah (Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kuliyah)*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah. Hal, 37.

¹⁰¹ *Ibid.* Dan lihat juga Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Menimbang bahwa (a) bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadan, salat Idul Fitri dan Idul Adha, serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan

Menjaga kemaslahatan umat merupakan salah satu tugas pemerintah, apapun keputusan pemerintah harus mengandung kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fikih berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Ketetapan imam untuk rakyat harus berdasarkan pada kemaslahatan.*¹⁰²

Apapun keputusan yang diambil pemerintah tidak dapat dibenarkan secara syari'at selama tidak dimaksudkan untuk kemaslahatan umum.¹⁰³

Menurut pendapat penulis, keputusan pemerintah dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal adalah mengandung kemaslahatan umum dan keputusannya wajib diikuti untuk kepastian hukum, menghilangkan perbedaan pendapat dan menjaga keutuhan dan persatuan umat.

I. Negara Menjamin Kebebasan Berkeyakinan dalam Beragama

1. Landasan Yuridis

Salah satu ciri dari negara hukum atau *the rule of law* adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara kepada warga negara. Makna jaminan perlindungan disini adalah bahwa negara

ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut; (b) bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syiar dan dakwah Islam; Memutuskan: *Pertama*, 1) Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. 2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. 3) Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait. 4) Hasil rukyah dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyah walaupun di luar wilayah Indonesia yang matlaknya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

¹⁰² Imam Al-Suyuti. 2006. *al-Ashbah wa al-Nazā'ir*, Juz. Kairo : Dār al-Salām. Hal, 278.

¹⁰³ 'Abd al-Aziz Muḥammad Azzam. 2005. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Kairo : Dār al-Hadith. Hal, 260.

memiliki kewajiban untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfil*), dan memastikan (*to ensure*) HAM.¹⁰⁴

Secara yuridis kehidupan keberagamaan di Indonesia memang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan keberagamaan, yaitu dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD tahun 1945, pasal 29 ayat (2) UUD tahun 1945 dan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28E ayat (1) UUD tahun 1945 yang berbunyi : *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.* Dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan*

¹⁰⁴ Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi, M. Syaiful Aris. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang : LPSHAM Muhammadiyah Jatim dan Madani. Hal, 3.

kepercayaannya itu. Dan ayat (2) berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam pandangan Imam al-Mawardi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara berkewajiban untuk melindungi keutuhan dan kesatuan umat dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia,¹⁰⁵ termasuk menjaga *wilâyah al-dîniyah* yaitu menyangkut kepentingan-kepentingan umum dalam pembangunan bidang agama. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintahan yang dianut di Indonesia sebagaimana diwujudkan dengan adanya institusi Kementerian Agama yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam sektor agama. Kementerian Agama mengayomi, melayani, membimbing dan sampai taraf tertentu ikut membina kehidupan umat beragama dalam statusnya sebagai warga negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰⁶

Dalam kebebasan berkeyakinan secara internasional tercantum dalam Deklarasi Universal HAM. Pada pasal 2 deklarasi ini menyatakan: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang

¹⁰⁵ Imam al-Mawardi. 2006. *al- Ahkâm as-Sulthaniyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*. Fadli Bahri (terj.). Jakarta : PT. Darul Falah. Hal, 23.

¹⁰⁶ Hamdun. 2014. *Pendekatan Blusukan Jokowi-JK Sebagai Titik Temu Inifikasi Penetapan Awal Bulan Qamariah di Indonesia*. Malaysia. Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2014. Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Hal, 346.

berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran, ataupun kedudukan lain. Secara khusus tentang hak kebebasan berkeyakinan dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam pasal 18. Kovenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005. Isinya yaitu: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.¹⁰⁷

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional tersebut secara jelas disebutkan dalam pasal 18: Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan

¹⁰⁷ Sartini. 2008. *Etika Kebebasan Beragama*. Yogyakarta. Jurnal Filsafat Vol. 18, Nomor 3, Desember 2008. Fakultas Filsafat (UGM). Hal, 247-248.

ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum atau secara pribadi.¹⁰⁸

Selanjutnya, dalam esensi kebebasan beragama atau berkeyakinan menjadi 8 (delapan) komponen, salah satunya dalam huruf (d) dan huruf (f), yaitu: huruf (d) adalah tidak diskriminatif, yang artinya negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk (asli atau pendatang), serta asal usulnya. Dan huruf (f) adalah adanya kebebasan lembaga dan status legal, yang maksudnya bahwa aspek vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.¹⁰⁹

Selain itu dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.* Dalam pasal ini juga diakui

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.* Hal, 257.

bahwa hak untuk beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi manusia.

Akan tetapi, HAM tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Selanjutnya pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, HAM tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹¹⁰

Dalam kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan menurut agama bagi umat Islam, pemerintah menjamin dan memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatannya dan pemerintah hanya mengatur aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan dan kelancaran pelaksanaan dari hukum Islam,¹¹¹ seperti bidang muamalah yaitu administrasi dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, pemberdayaan zakat, wakaf dan pelaksanaan hari-hari besar Islam. Kaidah fikhiyah :

الأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: *Hukum asal dalam urusan muamalah adalah mubah (dibolehkan) sampai ada dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya.*¹¹²

¹¹⁰ Selengkapnya baca pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

¹¹¹ Abdul Halim. 2008. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI. Hal, 316.

¹¹² Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. *Op.cit*, Hal, 161.

Sedangkan dalam bidang ibadah mahdah (pelaksanaan ibadah fardlu) dari sisi peribadatannya, seperti salat, puasa, zakat, haji dan ritualitas lainnya, maka praktis hukum Islam dalam bidang ini berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan pemerintah atau negara tidak perlu intervensi pelaksanaan ritualitas ibadah kepada umat Islam. Seperti salat lima waktu wajib (fardlu a'in) diganti menjadi ibadah sunah (sunah mu'akad). Kaidah fikhiyah :

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الْوَجِبِ

Artinya: *Hukum asal dalam urusan ibadah adalah haram (dilarang) sampai ada dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya.*¹¹³

2. Kebebasan Berkeyakinan, Beragama dan Toleransi Menurut Para Ahli

Ada banyak pengertian “kebebasan” dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah tidak adanya larangan. Meskipun demikian, konsep dasar kebebasan juga harus memperhatikan tidak adanya intervensi dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Jadi ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak di intervensi oleh tindakan tersebut.¹¹⁴

Kebebasan warga negara tidak boleh di intervensi baik oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun produk perundang-

¹¹³ Wawancara dengan Dr. Sriyatin Shodiq, S.H., M.Ag., M.H. Ahli Hisab dan Rukyat, di Surabaya pada hari Sabtu, 2 September 2017 pukul 19.00 WIB. Baca juga Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. *Op.cit.* 160.

¹¹⁴ Al Kanif, S.H., M.A., LL.M. 2010. *Hukum Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Edisi I. Yogyakarta : LaksBang Mediatama. Hal, 86.

undangan sekalipun. Jadi manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada di dalam hukum.¹¹⁵

Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa: *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...*” dan pasal 28E ayat (2) berbunyi: *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.* Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam pasal 29 ayat (2) bahwa: *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Merujuk dasar-dasar tersebut diatas, dalam perspektif HAM hak kebebasan beragama atau berkeyakinan ini dapat disarikan ke dalam 8 (delapan) komponen, yaitu: *Pertama*, kebebasan internal. Setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atas kepercayaannya. *Kedua*, kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan, secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengalamannya, dan peribadahnya. *Ketiga*, tidak ada paksaan. Tidak seorang pun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan

¹¹⁵ *Ibid.* Hal, 86-87.

mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya. *Keempat*, tidak diskriminasi. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, asal-usul. *Kelima*, hak dari orang dan wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah (jika ada) untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri. *Keenam*, kebebasan lembaga dan status legal. Kebebasan bagi setiap komunitas keagamaan untuk berorganisasi atau berserikat. *Ketujuh*, pembatasan yang diijinkan pada kebebasan eksternal. Kebebasan bagi setiap orang untuk memanifestasikan ajaran agama hanya dapat dibatasi oleh undang-undang. dan kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain. *Kedelapan*, non-derogability. Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun.¹¹⁶

Jika 8 (delapan) komponen itu dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka akan terwujud suasana damai penuh toleransi. Setiap komunitas agama akan menghormati komunitas lain, dan mereka dapat berkomunikasi dan bekerja sama dalam suasana

¹¹⁶ Elza Peldi Taher (ed). 2011. *Merayakan Kebebasan Beragama (Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi)*. Jakarta : Democracy Project. Hal, 343-344.

saling pengertian, penuh cinta kasih. Dalam konteks Indonesia yang multi-agama, prinsip kebebasan beragama tak hanya mempunyai landasan pijak dalam konstitusi dan undang-undang nasional, melainkan juga berakar kuat dalam tradisi berbagai agama dan kepercayaan yang hidup ribuan tahun di Nusantara.

Mengenai soal beragama dan toleransi, Islam tidak mengenal konsep pemaksaan beragama. Allah swt. berfirman di dalam al-Qur'an Yunūs (10) : 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.*¹¹⁷

Kerukunan antar umat beragama merupakan satu unsur penting yang harus dijaga di Indonesia yang hidup di dalamnya berbagai macam suku, ras, aliran dan agama. Untuk itu sikap toleransi yang baik diperlukan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut agar kerukunan antar umat beragama dapat tetap terjaga, sebab perdamaian nasional hanya bisa dicapai kalau masing-masing golongan agama pandai menghormati identitas golongan lain.¹¹⁸

Persoalan perbedaan hari raya di Indonesia, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (dikenal Buya Hamka), bisa menjadi teladan tentang bagaimana

¹¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Op.cit.* Surat Yunūs (10): 99.

¹¹⁸ M. Natsir. 1988. *Islam dan Kristen di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah. Hal, 209.

toleransi beragama yang baik. Tahun 1968, umat Muslim berhari raya Idul Fitri dua kali, yaitu pada 1 Januari dan 21 Desember 1968. Dekatnya tanggal Hari Raya Idul Fitri dengan Natal kemudian menginspirasi sebagian kepala jawatan dan menteri untuk mengeluarkan perintah agar perayaan halal bihalal digabungkan dengan Natal menjadi Lebaran-Natal. Sebagian pejabat mengatakan bahwa demi kesaktian Pancasila, Lebaran-Natal ini dapat membantu kita memahami makna toleransi.¹¹⁹ Buya Hamka menolak dengan keras toleransi yang semacam itu. Bagi Hamka, yang semacam itu adalah toleransi paksaan dan memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan pandangan sinkretisme.

Cendekiawan Muslim berpandangan tentang gagasan mewujudkan kerukunan umat beragama. Menurutnya nilai keislaman itu tidak hanya dipandang dari sudut internal umat Islam dalam berhubungan umat seagama tetapi bagaimana sikap orang Islam terhadap agama lain yaitu mampukah ia membangun sikap saling bertoleransi dalam beragama. Karena sebenarnya kesempurnaan agama Islam adalah karena agama ini bersifat mengayomi semua agama yang ada dan sikap itulah yang dulu dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada umat lain.¹²⁰

¹¹⁹ Akmal Syafril. *Hamka Tentang Toleransi Beragama*, dalam rubrik Islamia Republika, Kamis 15 Desember 2011. Hal, 24.

¹²⁰ Nurcholish Madjid. 1998. *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta : Paramadina. Hal, 267-268.